

PENDIDIKAN POLITIK OLEH KELUARGA BAGI PEMILIH PEMULA DI DESA NGARES KECAMATAN TRENGGALEK

Garin Ocshela Anggraini

15040254098 (Prodi S1-PPKn, FISH, UNESA) garina@mhs.unesa.ac.id

Maya Mustika Kartika Sari

0014057403 (Prodi S1-PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan politik yang diberikan oleh orang tua bagi pemilih pemula di Desa Ngares. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini berjumlah empat belas orang, dengan kriteria pemilihan informan yaitu orang tua yang memiliki anak sebagai pemilih pemula atau sudah berusia tujuh belas tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini diuji menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memberikan pendidikan politik melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Pengenalan tentang politik, yang dilakukan pada saat pemilih pemula berusia tujuh belas tahun atau sudah memiliki hak pilih; (2) Penguatan, yang diberikan melalui proses diskusi, pemberian contoh-contoh sikap demokrasi, pemanfaatan media sebagai alat untuk mencari informasi, serta mengikuti kegiatan sosialisasi politik; (3) Pengawasan, yang dilakukan oleh orang tua adalah memberikan dukungan serta motivasi kepada pemilih pemula untuk dapat aktif dalam kegiatan politik yang ada di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Peran Orang Tua, Pendidikan Politik

Abstract

This study aims to study the political education provided by parents for beginner voters in Ngares Village. This study use descriptive qualitative. Data collection techniques used were observation, in-depth interviews, and documentation. The subject of this study supposed fourteen people, with the selection criteria of informants namely parents who have children as beginner voters or have chosen seventeen years. The analysis technique used is data reduction, data presentation, and verification data. The result of this study show that parents provide political education through the following stages: (1) Introduction to politics, which is done when beginner voters start seventeen years or already have the right to vote; (2) Strengthening, which is give trough a discussion process, provides examples of attitudes democratic, using medis as tool to find information, and participacing in political socialization activities; (3) Supervision, which is done by parents is to provide support and motivation for beginner voters to be activities in the community.

Keywords: The role of parents, political education.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu penganut sistem demokrasi, oleh karena itu segala praktik penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan kehendak rakyat. Sebagai aksi nyata pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat adalah, dengan melibatkan rakyat untuk ikut serta berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan politik. Sesuai dengan asas demokrasi bahwa pemerintahan adalah dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga rakyat memiliki kewenangan yang cukup besar untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Akan tetapi yang menjadi persoalan saat ini adalah rendahnya minat warga negara terhadap politik,

berdasarkan *survey* yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada akhir Juli 2018 menunjukkan minat masyarakat terhadap politik begitu rendah. Sebesar 56 persen responden ahli dalam bidang politik menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam politik masih buruk, oleh karena itu perlu memberikan pendidikan politik yang baik di masyarakat (LIPI). Permasalahan terkait dengan rendahnya partisipasi politik dikarenakan kurangnya pengetahuan serta sosialisasi politik, hal ini yang menjadi indikasi kuat terkait belum mendalamnya pemahaman serta kurangnya partisipasi masyarakat Indonesia terkait dengan hak politik yang dimiliki (Alex, 2013:3).

Menurut Gabriel Almond, sosialisasi politik merupakan bagian dari pendidikan politik yang khusus

membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya (Damsar, 2013:154). Sosialisasi politik wajib dilakukan karena pada pemerintahan yang demokratis, rakyat dituntut untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu sosialisasi dan pendidikan politik sangat penting diberikan pada saat menjelang pemilu, sebagai tujuan untuk membangun kesadaran politik rakyat agar mereka sadar dengan peran mereka, dalam menggunakan hak dan kewajiban yang dia miliki dalam kehidupan politik bernegara. Pada saat rakyat memiliki pengetahuan dan kesadaran politik yang cukup, proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar.

Pendidikan politik dapat dilakukan dimana saja, karena terdapat beberapa macam agen-agen sosialisasi politik yang menjadi penyalur pendidikan dan pengetahuan politik di masyarakat. Agen-agen sosialisasi politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi orientasi dari pemilih pemula, karena pada dasarnya agen sosialisasi politik merupakan ruang untuk belajar politik. Pertama adalah keluarga, di lingkungan keluarga mereka akan belajar demokrasi untuk pertama kalinya. Kedua, teman sebaya yang memiliki pengaruh dalam hal informasi dan pendidikan politik, karena hal ini akan memiliki dampak terhadap persepsi dari tindakan positif dan negatif. Ketiga, media massa yang berpengaruh cukup besar karena media massa mampu menyajikan sumber informasi politik pada khlayak secara efektif dan efisien (Kartika Maya, dkk, 2017:1-2).

Permasalahan kurangnya pendidikan politik dan pemahaman terkait hak politik yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, sangat bertolak belakang dengan potensi bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara demokrasi yang besar. Potensi penduduk Indonesia yang perlu diberdayakan dalam segi pendidikan politik dan upaya meningkatkan partisipasi politik adalah generasi muda. Menurut KPU Jatim ada sekitar 487.831 orang yang tercatat sebagai pemilih pemula pada tahun 2019, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Secara signifikan, jumlah pemilih pemula menjadi indikasi betapa potensialnya pengaruh pemilih pemula dalam politik di Indonesia.

Selain itu, generasi muda juga dijadikan sebagai pelopor gerakan perubahan kearah perbaikan suatu bangsa. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa, perintis berbagai gerakan perubahan politik bangsa selalu diawali oleh generasi muda. Karena hal inilah generasi muda dijuluki sebagai *agent of change* (sebagai generasi yang dapat memelopori perubahan ke arah perbaikan suatu bangsa). Apabila generasi muda yang termasuk sebagai pemilih pemula banyak melakukan golput, tatanan pemerintahan

di negara ini tidak akan membawa kearah perbaikan. Hal ini dapat terjadi karena pemilih pemula cenderung memiliki karakteristik yang tidak stabil dan apatis, serta kurangnya pengetahuan politik yang dimiliki.

Peran keluarga sebagai guru dalam pendidikan politik sangat diperlukan untuk mengurangi angka golput yang terjadi di kalangan pemilih pemula, karena keluarga memiliki peran sebagai pendidik pertama bagi anak. Keluarga mulai mendidik seorang individu saat mereka kecil hingga mereka dewasa, setelah seorang anak dewasa mereka akan mulai berinteraksi dengan masyarakat. Di dalam masyarakat mereka akan mengalami proses sosialisasi, karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa manusia lainnya (Hadikusumo, 2006:63). Keluarga menjadi salah satu komponen penting yang berperan dalam pendidikan politik, karena di dalam keluarga anak akan memperoleh pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dalam keluarga, sehingga dapat meningkatkan pemahaman politik pada anak serta kecakapan untuk melakukan sebuah interaksi politik (Sunarso, 2007:25-26).

Pendidikan Politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa sebagai upaya efektif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggungjawab, secara etis dan moral dalam mencapai tujuan politik. Pendidikan politik berisi aktivitas pendidikan diri (mendidik diri sendiri dengan secara sadar dan sengaja) yang dilakukan secara berkelanjutan dan berproses di dalam diri seseorang, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri serta situasi kondisi di lingkungannya (Kartini K, 2009: 64-65).

Alfian (1995:248) juga menganalisis keberhasilan pendidikan politik ditinjau dari dua dimensi, yang pertama adalah gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan. Kedua, ialah realitas atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung dibandingkan dengan tuntutan-tuntutan system politik ideal tadi. Keberhasilan pendidikan politik tentunya akan melahirkan masyarakat yang paham akan politik, sehingga pemahaman ini akan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi secara berkualitas. Agar pendidikan politik berhasil, maka pemerintah juga melakukan kegiatan intens tentang pendidikan politik di masyarakat. pendidikan politik ini tidak hanya dipahami atau ditanamkan disekolah melainkan juga dapat dilakukan melalui proses sosialisasi politik. Sosialisasi politik haruslah dilakukan secara lebih luas yaitu melibatkan banyak orang dan dilaksanakan secara dialogis-interaktif.

Jika melihat maksud pendidikan politik di atas, tidaklah salah apabila pendidikan politik perlu di realisasikan kepada generasi muda sebagai bagian dari

pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan kehidupan politik yang demokratis di masa depan. Selain itu, di harapkan agar generasi muda mampu berperan serta dan aktif dalam kehidupan bangsa dan negara secara penuh tanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Covey (dalam Yusuf, 2009:47-48) mengajukan prinsip peran dalam keluarga, yaitu: (a) *Modelling (example of trustworthness)*. Orang tua adalah contoh atau model bagi anak; (b) *Mentoring*, yaitu kemampuan untuk menjalin dan membangun hubungan, investasi emosional (kasih sayang kepada orang lain); (c). *Teaching*, orang tua berperan sebagai guru (pengajar) bagi anak-anaknya (anggota keluarga) tentang hukum-hukum dasar kehidupan.

Kajian mengenai pendidikan politik dalam keluarga telah dimulai sejak zaman Plato dan Aristoteles, yang mengasumsikan pendidikan anak-anak itu serupa dengan tabiat negara. Pemikiran lainnya, Boden, dalam tulisannya juga mengemukakan mengenai urgensi ketaatan dalam institusi keluarga sebagai dasar ketaatan terhadap institusi pemerintahan. Meskipun begitu, kesadaran akan adanya pendidikan politik dalam keluarga seperti ini memang belum dimiliki oleh sebagian masyarakat. Mereka hanya memberikan hak pendidikan politik kepada pemerintah dan partai politik (Kompasiana.com).

Praktik pendidikan politik dalam institusi keluarga dapat berlangsung dengan baik apabila didukung oleh berbagai perangkat dan mekanisme. Menurut Izzat (1997:24), pendidikan politik dalam keluarga yang harus diutamakan adalah hierarki kekuasaan dalam institusi keluarga, kedua, suasana keluarga, ketiga, bahasa, konsep serta simbol-simbol. Hierarki kekuasaan keluarga merupakan cara pendidikan politik, karena institusi keluarga merupakan negara kecil bagi anak-anak. Menurut Dean Jaros dalam bukunya *Socialization to Politics* (1973), pengetahuan anak-anak tentang kekuasaan yang ada dalam institusi keluarga merupakan awal pengetahuan didalam negara dan kedudukannya di dalam negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode-metode deskriptif. Arikunto (201:3) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi, yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian. Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci kalimat penjelasan secara kualitatif mengenai peran orang tua dalam memberikan pendidikan politik untuk pemilih pemula.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua dan pemilih pemula. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, dan juga ketelitian dalam menganalisis data. Informan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang dengan kriteria sebagai berikut: (1) Orang tua yang memiliki anak sebagai pemilih pemula atau sudah berusia tujuh belas tahun; (2) Orang tua yang tinggal bersama pemilih pemula. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

| No. | Informan Utama | Informan Sekunder |
|-----|--|--|
| 1. | Nama : Sarni L/P : L (Laki-laki) Usia : 44 th Agama : Islam Pendidikan: SD Pekerjaan : Petani | Nama : Muhammad Iqbal L/P : L (laki-laki) Usia : 17 Agama : Islam Pendidikan : SMKN 1 Trenggalek |
| 2. | Nama : Siti Fatimah L/P : P (Perempuan) Usia : 39 th Agama : Islam Pendidikan: SMP Pekerjaan : Pedagang | Nama : Titik Kolipah L/P : P (perempuan) Usia : 17 th Agama : Islam Pendidikan: SMKN 1 Pogalan |
| 3. | Nama : Dhiyan Royadi L/P : L (laki-laki) Usia : 40 th Agama : Islam Pendidikan: SMA Pekerjaan : Swasta | Nama : Dhola Dharoyni L/P : L (laki-laki) Usia : 17 th Agama : Islam Pendidikan:SMAN 2 Trenggalek |
| 4. | Nama : Jito L/P : L (laki-laki) Usia : 58 th Agama : Islam Pendidikan: Sarjana Pekerjaan : Guru | Nama : Revilda Dwi H L/P : P (perempuan) Usia : 17 th Agama : Islam Pendidikan:SMAN 1 Trenggalek |
| 5. | Nama :Slamet Daroini L/P : L (laki-laki) Usia : 46 th Agama : Islam Pendidikan: SMP Pekerjaan : Swasta | Nama : Intan Avrilia L/P : P (perempuan) Usia : 17 th Agama : Islam Pendidikan:SMAN 1 Trenggalek |
| 6. | Nama : Yanto L/P : L (laki-laki) Usia : 56 th Agama : Islam Pendidikan: Sarjana Pekerjaan : Guru | Nama : Intan Nurdiana L/P : P (perempuan) Usia : 17 th Agama : Islam Pendidikan:SMAN 1 Trenggalek |
| 7. | Nama :Suhariawan L/P : L (Laki-laki) Usia : 47 th Agama : Islam Pendidikan: SMK Pekerjaan :Karyawan Pabrik | Nama :Bagus Suryawan L/P : L (laki-laki) Usia : 17 th Agama : Islam Pendidikan: SMAN 1 Trenggalek |

Sumber: Data Primer, 2019

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi.

Pertama, teknik observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh orang tua dalam memberikan pendidikan politik. Kedua, teknik wawancara mendalam. (*indepth interview*) berupa wawancara semiterstruktur. Pelaksanaan wawancara semiterstruktur lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Ketiga, dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2014:240).

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pengujian penelitian ini menggunakan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2014:270). Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) dengan menggunakan cara triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2014:273). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari keluarga dan pemilih pemula. Triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan, mengategorisasikan antara pandangan yang sama dan pandangan yang berbeda dari berbagai sumber tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga menjadi salah satu komponen penting yang berperan dalam pendidikan politik, karena didalam keluarga anak akan memperoleh pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dalam keluarga, sehingga dapat meningkatkan pemahaman politik pada anak serta kecakapan untuk melakukan sebuah interaksi politik. Pendidikan politik merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman seseorang dalam memaknai politik serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pandangan adalah cara berfikir atau perspektif seseorang terhadap suatu hal. Sebagai

salah satu agen sosialisasi politik, pastilah keluarga memiliki suatu pandangan terkait dengan pendidikan politik. Pengenalan terkait politik yang diberikan kepada pemilih pemula adalah pada saat pemilih pemula sudah memiliki hak pilih, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Siti Fatimah,

“...nek menurutku wajib mbak soale pengetahuan politik kui pancen kudu diajarane nang bocah seusia Kholif, opo maneh anakku yo kadang iseh bingung karo politik seng semrawut koyok saiki. Senajan aku ra pati paham politik tapi aku weroh politik kui penting gawe kemajuan negoro, sepisan nek seusia anak ku yo ora tertarik politik, ujung-ujung e engko malah golput pas pemilu”. (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, pukul 08.15 WIB).

“...kalau menurutku wajib, karena pengetahuan politik itu memang harus diajarkan ke anak seusia Kholif, apalagi anak ku kan kadang masih bingung dengan politik yang semrawut seperti sekarang. Walaupun aku tidak terlalu paham politik tapi, aku mengerti kalau politik itu penting bagi kemajuan negara, dan untuk seusia anakku kadang tidak tertarik politik, ujung-ujungnya nanti malah golput waktu pemilu.” (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, pukul 08.15 WIB).

Siti menjelaskan bahwa orang tua memiliki tanggungjawab untuk memberikan pendidikan politik kepada anak, meskipun pengetahuan yang dimiliki terbatas tetapi sebagai orang tua Siti menghimbau agar anak tidak golput pada saat pemilu, karena anak yang masuk usia remaja terkadang sangat tidak tertarik dengan politik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Jito, menurut Jito sebagai orang tua kita harus wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada anak yang akan mulai menggunakan hak suara pertama kalinya dalam pemilu,

“...jelasnya wajib, karena politik merupakan hal yang juga penting untuk dipelajari. Selain dapat dari pelajaran di sekolah, sebagai orang tua saya juga harus memberikan pengetahuan politik pada anak saya. Pendidikan politik mulai saya ajarkan sejak kecil dengan mengenalkan bagaimana pancasila bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi orang seperti saya termasuk pengetahuan politiknya hanya secara garis besar jadi saya beri arahan waktu menjelang pemilu. Secara garis besar maksudnya, hanya tau kalau politik itu digunakan untuk memilih pemimpin negara jadi sebagai warga negara harus bisa pintar dalam menentukan pilihan, supaya tidak menyesal.” (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, 08.20)

Diketahui bahwa pendidikan politik yang diberikan oleh Jito hanya sebatas pengertian secara umum, seperti pengertian politik yang digunakan untuk menentukan pilihan terhadap pemimpin negara. Walaupun disekolah juga mendapatkan pendidikan politik, tapi sebagai orang

tua juga harus tetap wajib memberikan pendidikan politik di rumah. Pendidikan politik yang diberikan keluarga kepada pemilih pemula, bertujuan untuk mengurangi angka golput pada saat menjelang pemilu. Selain itu juga sebagai fungsi agar pemilih pemula memiliki kesadaran dalam berpolitik. Pendapat ini juga di dukung dengan pernyataan dari Dhiyan,

“...ya seperti yang saya bilang kalau pendidikan politik itu sangat penting diberikan atau disosialisasikan pada pemilih pemula, atau bahkan pada semua masyarakat agar mereka memiliki kesadaran dalam berpolitik. Kalau di dalam keluarga ya pasti saya yang berperan memberikan pendidikan politik bagi anak saya, selain itu juga karena di desa sini juga tidak ada sosialisasi yang dilakukan dari pihak KPU maupun parpol. Bahkan yang lebih parah waktu rekrutmen anggota KPPS kemarin juga tidak disosialisasikan dari jauh-jauh hari, dan baru disosialisasikan H-1 menjelang pemilu. Saya kan orang awam ya dengan politik, kalau memberikan pengetahuan politik ya seadanya untuk anak saya yang paling penting dia tidak golput dan bisa memberikan kontribusi suara untuk para calon-calon pemimpin”. (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, 09.45 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dhiyan, yang menjelaskan bahwa perannya sebagai kepala keluarga juga merangkap sebagai salah satu pendidik dalam memberikan pengetahuan politik, hal ini dikarenakan kurang aktifnya parpol dan KPU dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Kurang aktifnya dalam memberikan pendidikan politik juga dapat dilihat pada saat evaluasi petugas KPPS.

Hal serupa juga didukung oleh Slamet yang berpendapat bahwa pendidikan politik sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat dan tidak hanya pada pemilih pemula, karena masyarakat masih banyak yang buta mengenai politik dan masih sering melihat intrik politiknya daripada esensi perpolitikannya.

“...pendidikan politik memang penting untuk diberikan kepada pemilih pemula dan juga masyarakat umum, karena kita tahu bahwa masih banyak masyarakat kita yang tidak tertarik dengan politik, dan hanya tertarik pada intrik politiknya daripada memperdalam tujuan dan fungsi kita sebagai warga negara dalam dunia politik. Inilah kenapa sangat penting pendidikan politik untuk diberikan karena apabila masyarakat buta terhadap politik maka akan memiliki pandangan bahwa politik itu negatif. Pendidikan politik saya berikan ketika anak saya sudah cukup paham dengan politik, lebih tepatnya saat masuk SMA karena dia memang sudah harus sadar dalam berpolitik.” (Wawancara :Minggu, 5 Mei 2019, 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik sangat perlu untuk diberikan kepada pemilih pemula maupun masyarakat umum, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang sering melakukan golput pada saat pemilu dan juga kurangnya pengetahuan tentang fungsi dan tujuan politik bagi masyarakat.

Proses Pendidikan Politik yang di berikan Orang Tua kepada Pemilih Pemula

Pendidikan politik yang dilakukan oleh keluarga terhadap pemilih pemula dilaksanakan dengan berbagai aktivitas. Aktivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Dalam penelitian ini, aktivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh orang tua terhadap pemilih pemula ditinjau dari tiga hal yaitu berdiskusi, memberi dukungan atau motivasi dan memberikan contoh sikap demokratis.

Tabel 2. Proses Pendidikan Politik

| No. | Proses Pendidikan Politik |
|-----|---|
| 1. | Orang tua sebagai <i>Partner</i> dalam berdiskusi politik |
| 2. | Memberikan motivasi dan dukungan |
| 3. | Memberikan contoh sikap demokrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Menolak adanya politik uang b. Orang tua sebagai sumber informasi agar tidak golput c. Berita Hoax |
| 4. | Memanfaatkan media massa dan media sosial |
| 5. | Mengikuti Sosialisasi Politik |

Sumber: Data Primer, 2019

Dalam proses pendidikan politik yang pertama adalah peran orang tua sebagai *partner* dalam berdiskusi terkait politik. Diskusi yang dilakukan oleh orang tua dengan pemilih pemula sebagai salah satu bentuk pemberian pendidikan politik dalam ranah pengetahuan. Menurut Siti Fatimah, diskusi yang dilakukan dengan pemilih pemula adalah tentang calon-calon yang akan maju pada saat menjelang pemilu.

“...jarang diskusi kecuali arep enek pemilihan. Seng dadi bahan omongan yo tentang calon seng arep maju neng pemilu. Tapi biasane anakku sering takon, soale bingung karo sopo seng dipilih. Malah kadang anakku pilihan e bedo karo aku tapi pas diwenehi pengerten karo bapak e malah dadi melok pilihanku.” (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, 10.20 WIB).

“...jarang diskusi kecuali mau ada pemilihan. yang jadi bahan bahasan ya tentang calon yang akan maju di pemilu. Tapi biasanya anakku yang sering tanya, karena bingung siapa yang akan dipilih. Kadang anak ku pilihannya beda sama saya tapi waktu tak kasih pengerten sama bapaknya juga, akhirnya jadi ikut milih sesuai dengan pilihanku.” (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, 10.20 WIB).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kholif, yang menyatakan bahwa diskusi politik yang dilakukan dengan orang tuanya hanya pada saat mendekati waktu pemilihan,

“...diskusi tentang politik jarang kecuali mau ada pemilu, kalau saya seringkali lihat youtube yang menurut saya pantas untuk dijadikan pemimpin di masa depan siapa, karena pandangan saya sama orang tua biasanya tidak sama, makanya setelah saya lihat youtube terus di diskusikan sama orang tua. Tapi kebetulan pilihan saya sama orang tua sama, jadi ya sering diskusi kalau lihat di TV ada debat-debat”. (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, 10.20 WIB).

Berbeda dengan penuturan dari Dhiyan, walaupun jarang bertemu dengan anak dirumah karena bekerja tetapi untuk berdiskusi terkait politik masih sempat dilakukan pada saat malam hari,

“...kalau untuk berdiskusi jarang, karena ya itu tadi saya kerja dan anak saya sekolah. Tapi kalau waktu lihat TV dan kebetulan ada membahas politik seperti kinerja presiden atau muncul partai-partai baru, pasti saya akan ajak diskusi. Diskusi itu juga hanya membahas hal-hal yang umum seperti evaluasi hasil kerja selama 5 tahun menjabat itu apa saja, dan juga beberapa anggota dewan yang terlibat kasus korupsi dari setiap partai berapa banyak. Saya juga kadang berdiskusi terkait pancasila yang sekarang sudah mulai hilang eksistensinya. Kalau tidak saya ajak diskusi sedikit-sedikit tentang politik, pasti anak saya juga bisa ikut terprovokasi.” (Wawancara: Sabtu, 4 Mei 2019, 08.30 WIB).

berdasarkan pernyataan Dhiyan, diskusi yang dilakukan dengan keluarganya adalah membahas tentang evaluasi kerja para pemimpin dan juga terkait pancasila yang sudah hilang eksistensinya di dunia politik. Untuk memperkuat hasil wawancara dengan Dhiyan peneliti juga mewawancarai Dhola,

“...kadang-kadang ngomong soal politik sama bapak kecuali pas bapak dirumah dan aku juga lagi dirumah, ngobrol tentang hasil kerja yang sudah di lakukan sama pemerintah selama 5 tahun itu apa saja, sama seringkali ngomongin supaya tidak terprovokasi sama orang-orang yang sering menjelek-jelekan calon pemimpin waktu pemilihan.” (Wawancara: Sabtu, 4 Mei 2019, 08.30 WIB).

Informan selanjutnya adalah Slamet, menurutnya diskusi politik dengan pemilih pemula harus sering dilakukan, karena dalam pendidikan politik sangat diperlukan *sharing* untuk bisa mengetahui opini-opini anak yang harus di dengar.

“...untuk diskusi yang saya lakukan sama anak saya memang tidak sering, biasanya kalau akan pemilihan. Kadang anak punya opini tentang anggota pemerintah yang suka bohongin publik, tapi disini saya arahkan bahwa mereka tidak

berbohong. Mereka sudah melakukan pekerjaannya dengan sesuai yang di amandatkan tapi belum maksimal.” (Sumber :Minggu, 5 Mei 2019)

berdasarkan pernyataan yang diberikan Slamet, anak harus diberi pengertian tentang opini mereka yang negatif kearah positif tanpa membela atau membenarkan yang memang terlihat salah. Hal ini juga mempengaruhi pola pikir dari Intan, yang mengatakan bahwa tidak selamanya yang terlihat buruk itu akan selamanya buruk.

“...seringkali sih sharing-sharing aja sama ayah, gak setiap hari sih tapi memang lumayan sering. Disini ayah yang sering bilang kalau kita hidup pasti banyak selisih pahamnya sama orang lain, jadi tergantung gimana kita menyikapi saja. Karena yang selamanya kita anggap mudah atau baik juga ada buruknya, dan yang selamanya buruk juga belum tentu selamanya buruk. Sama kayak wakil rakyat, aku dulu paling anti kalau bahas mereka karena menurutku ya mereka bisanya cuman ngomong tanpa ada hasil, kalau ada hasilnya juga korupsi. Sempet mikir nanti kalau udah bisa milih, aku gak mau milih mereka tapi orang tua yang sering kasih gambaran sama opini tentang mereka jadi ya bisa sedikit membantu cara pikir dan pandanganku sama mereka.” (Wawancara: Minggu, 5 Mei 2019, 09.23 WIB).

Pendidikan politik yang didapatkan oleh Intan tidak hanya dari orang tua tapi juga dari lingkungan sekolah, karena Intan juga mengikuti kegiatan OSIS sehingga membuatnya belajar kepemimpinan dan belajar cara menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Pendidikan politik tidak hanya terpusat dalam ke aktifan masyarakat dalam pemilu, tetapi juga bagaimana mereka bisa memposisikan diri sebagai warga negara yang berfungsi dalam menjalankan peraturan dan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia, membebaskan masyarakat untuk berpendapat dan mengeluarkan pikiran mereka untuk memberikan kontribusi dalam kebijakan publik, dari hal ini kita harus bisa memanfaatkan peluang sehingga dapat ikut berpartisipasi sebagai konstituen yang berguna dalam membuat peraturan yang berlaku.

Informan selanjutnya adalah Suhariawan, walaupun jarang berada di rumah karena bekerja diluar kota, namun masih sering berdiskusi dengan anaknya tentang masalah demo yang sering muncul saat pemilu. Aksi demo yang banyak dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena adanya rasa kurang puas terhadap hasil akhir dalam pemilu. Tindakan kekerasan pada aksi demo, juga dapat disebabkan karena provokasi dari beberapa oknum tertentu. Oleh karena itu banyak sekali himbauan dari pemerintah agar masyarakat tidak ikut terprovokasi hingga melakukan tindak kekerasan saat aksi demo, menurut Suhariawan banyak masyarakat yang

terprovokasi karena kurangnya pengetahuan politik yang didapatkan salah satunya dari keluarga,

“...demo yang sering terjadi setelah *quick count* kan memang hal biasa, tapi yang saya tidak suka kalau sampai ada kekerasan di dalamnya. Lha sekarang kita ndak tau yang ikut demo masyarakat yang umur berapa saja, demo kan tidak ada unsure batasan minial umur berapa yang ikut, takutnya nanti banyak yang masih dibawah 20 tahun ikut demo padahal dia juga gak tau apa-apa, kalau sebagai orang tua pasti akan saya himbau anak saya supa ndak ikut-ikut demo, kalau memang ndak sesuai dengan hasil yang dia harapkan ya sudah kita legowo saja. Wong demo malah akan memperburuk citra negara di luar negeri, karena saya lihatnya demo di Indonesia banyak bentroknnya daripada tertibnya.”

Berdasarkan penuturan Suhariawan, sebagai orang tua hanya bisa menghimbau agar anaknya tidak ikut dalam aksi-aksi demo, hal ini dikarenakan banyak aksi demo yang terjadi berujung dengan kekerasan. Himbuan yang diberikan oleh Suhariawan kepada pemilih pemula diberikan ketika dia bertanya terkait berita-berita demo yang banyak beredar di media sosial, pemberian himbuan kepada pemilih pemula dengan disertai contoh pada berita-berita di TV dan koran. Hal ini juga dibenarkan oleh Bagus,

“...gak tertarik ikut demo, paling juga malah rusuh nanti, kalau gak paham kan bisa tanya ke Bapak. Sering lihat di berita-berita kalau orang demo banyak bentroknnya, soale polisi selalu pakai gas air mata untuk bubarkan warga yang demo. Demo kan dilakukan untuk menyuarakan ketidakadilan yang diterima masyarakat, tapi kalau ujung-ujungnya bantrok ya percuma. Menurutku kenapa demo gak diwakilkan saja, kan enak kalau perwakilan minimal berapa orang nanti meminimalisir kericuhan.” (Wawancara: Sabtu, 5 Mei 2019, 09.20 WIB).

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Bagus, demo digunakan sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang kurang puas terhadap hasil akhir, seharusnya untuk meminimalisir kericuhan yang terjadi akan lebih baik apabila demo dilakukan dengan perwakilan beberapa orang untuk berdiskusi dengan anggota pemerintah.

Kedua, peran orang tua dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada pemilih pemula. Motivasi dan dukungan dari keluarga juga berkontribusi memberikan pengaruh kepada pemilih pemula untuk aktif secara langsung mengikuti kegiatan politik di lingkungannya. Seperti yang sering terjadi saat menjelang pemilu, yaitu perekrutan anggota KPPS dan juga sebagai saksi beberapa parpol, selain itu di sekolah juga terdapat organisasi-organisasi yang dapat mengajarkan pemilih pemula untuk aktif berpolitik. Menurut hasil wawancara

dengan Siti Fatimah, dia mengajak anaknya untuk ikut serta menjadi saksi dalam pemilu 2019, hal ini dikarenakan banyak beberapa anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya yang mengikuti perekrutan anggota KPPS.

“...motivasi saya ya saya suruh ikut jadi anggota KPPS, karena kemarin saya juga jadi saksi di TPS 03. Sebenarnya kemarin (waktu pemilu) sama saya yang jadi saksi, tetapi karena suamiku kerja jadi mandor kuli bangunan rumah, akhirnya anak saya yang tak suruh gantikan suamiku. Tujuannya saya ngajak anak saya ya agar dia bisa memiliki kesadaran politik dan punya kontribusi untuk negara dari perannya menjadi saksi, kemarin ya temannya juga banyak yang jadi petugas KPPS, akhirnya anak saya jadi saksi sama saya. Dan kemarin anak saya juga nganggur di rumah.” (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, 10.15 WIB).

Motivasi yang diberikan kepada pemilih pemula agar memiliki kontribusi dalam berpolitik salah satunya dengan mengajak menjadi saksi dari salah satu parpol dalam pemilu. Untuk memperkuat hasil wawancara dengan Siti peneliti juga mewawancarai Kholif,

“...kemarin ikut jadi saksi soalnya bapak tidak bisa ikut, jadi saya yang menggantikan. Kalau teman-teman yang lain menjadi anggota KPPS, kemarin mau ikut tapi pendaftarannya sudah ditutup”. (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, 10.25 WIB).

Berbeda dengan pendapat Sarni, yang beranggapan bahwa anak yang sudah berumur 17 tahun harus ikut membantu dalam pemilihan, sebagai bentuk pengetahuan politik dalam implementasinya,

“...seringnya saya kasih tau kalau kita itu juga harus belajar politik melalui kegiatan yang ada di masyarakat, salah satunya menjadi petugas KPPS. Karena seusia anak saya itu sudah harus wajib memilih, biar bisa sekalian belajar saya suruh untuk ikut jadi petugas KPPS, sebenarnya saya kemarin dapat amanat untuk menjadi anggota KPPS tapi saya kasih ke anak saya. Karena di desa sini KPU'nya bertambah 2x lipat dari tahun 2014 jadi ya pasti membutuhkan peran aktif yang lebih dari masyarakat”. (Wawancara: Sabtu, 4 Mei 2019, 10.34 WIB).

Hal ini juga didukung dari pernyataan Iqbal, kalau memang keinginannya sejak dulu adalah menjadi salah satu petugas KPPS.

“...aku tertarik ikut jadi anggota KPPS, selain dapat uang juga dapat ilmu. Bapak yang ngasih tau kalau anggota KPPS tahun ini butuh banyak tenaga jadi ya saya ikut daftar.” (Wawancara: Sabtu, 4 Mei 2019, 10.32 WIB).

Berdasarkan observasi hari Rabu, 17 April 2019, informan sekunder memang menjadi salah satu anggota

KPPS dalam pemilu tahun 2019. Seperti yang dikatakan oleh informan primer, bahwa dalam memberikan pendidikan politik salah satunya adalah dengan terjun langsung dalam kegiatan politik. Hal ini dilakukan agar, pemilih pemula dapat belajar secara langsung tentang penggunaan hak dan kewajiban sebagai warganegara tidak hanya dalam memberikan suara pada saat pemilu, tetapi juga sebagai pelaksana.



Gambar 1. Menjadi anggota KPPS dalam Pemilu 2019

Informan selanjutnya adalah Slamet, menurutnya pemilih pemula dapat mengikuti atau menjadi bagian dari politik tidak hanya terbatas dengan menjadi anggota KPPS atau saksi. Namun juga dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, karena secara tidak langsung ikut berperan dalam kegiatan politik di sekolah, seperti menjadi timses kandidat ketua OSIS atau menjadi ketua acara di beberapa event-event tertentu.

“...anak saya sudah ikut organisasi OSIS, bagi saya itu cukup untuk belajar berpolitik karena di sekolah dia juga menjadi salah satu timses untuk ikut mendukung atau mengkampanyekan temannya yang akan menjadi ketua OSIS. Itu kan sudah termasuk belajar politik, yang paling penting dia juga harus bisa supportive. Di sekolah juga terdapat beberapa event-event yang pernah di ketuai oleh anak saya, itu juga masuk sebagai belajar berpolitik karena dia dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang adil dan tegas.” (Wawancara: Minggu, 5 Mei 2019, 09.30 WIB).

Untuk membuktikan kebenaran dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Slamet, peneliti juga mewawancarai Intan,

“...orang tua mendukung sekali aku ikut organisasi di sekolah soalnya sebagian besar waktuku kan disekolah, di sekolah memang pernah jadi timses waktu temanku nyalon jadi ketua OSIS ikut mengkampanyekan visi misinya, aku juga pernah jadi ketupel acara disnatalis SMA. Jadi ketupel ada suka dukanya, tapi enak soalnya bisa sekalian belajar untuk jadi pemimpin dan mengasah rasa percaya diri untuk ngomong di depan umum”. (Wawancara: Minggu, 5 Mei 2019, 09.45 WIB)

Motivasi yang diberikan oleh beberapa orang tua memang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi tujuan dari pemberian motivasi tersebut adalah agar pemilih pemula dapat belajar secara langsung pendidikan politik yang ada di lingkungan sekitarnya. Dari beberapa

wawancara yang telah dilakukan, banyak dari orang tua yang mengajarkan anaknya untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan politik seperti menjadi anggota KPPS dan menjadi saksi maupun mengikuti organisasi sekolah untuk mengasah jiwa kepemimpinannya. Lain hal dengan salah satu informan, yang mengatakan bahwa motivasi yang diberikan kepada pemilih pemula hanya sebatas penggunaan hak suara.

Ketiga, dengan memberikan contoh sikap demokratis kepada pemilih pemula. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, warga negara Indonesia tentunya harus memiliki sikap dan perilaku yang demokratis. Sikap demokratis dalam pendidikan politik adalah berpartisipasi secara aktif dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik masyarakat inilah yang merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Partisipasi politik yang ada di masyarakat, dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

Menolak adanya politik uang, Money politik memang sering terjadi di dalam dunia politik, salah satunya saat masa kampanye atau mendekati pelaksanaan pemilu. Money politik dianggap sebagai budaya yang di wajarkan, hal ini lah yang sering mempengaruhi masyarakat untuk tidak berpartisipasi secara adil dalam pemilihan, hal ini juga mempengaruhi para pemilih pemula untuk golput apabila tidak diberikan uang saat akan memilih. Namun, masih ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa politik uang adalah budaya yang harus dimusnahkan karena tidak sesuai dengan asas dalam pemilu yaitu Luber Jurdil.

Seperti yang dikatakan oleh Dhiyan Rohadi, menurutnya politik uang adalah budaya yang harus dijauhi dan juga dimusnahkan karena dalam perpolitikan kita tidak harus selalu menghalalkan segala cara untuk memperoleh suatu kedudukan. Memiliki anak yang terdaftar sebagai pemilih pemula, membuat Dhiyan harus lebih ketat mengawasi agar anaknya tidak menerima uang yang diberikan oleh beberapa timses dari parpol,

“...ketika salah satu kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang akan menjadi satu hal yang lumrah untuk dilakukan. Saya sebenarnya tidak setuju dengan adanya money politik, karena kalau kita lihat pada zaman orde baru sangat jarang atau bahkan tidak ada yang namanya money politik. Pada saat itu kita memilih juga atas dasar pandangan kita sendiri. Karena menurut saya, negara ini bukan dipimpin oleh orang terbaik tapi negara ini diwakili atau dipimpin oleh orang berduit. Akhirnya ketika calon legislative yang dipilih menghalalkan segala cara untuk meraih kedudukan, pasti akan ada imbalan lebih besar yang akan diperoleh. Kalau anak saya mendapat uang dari money politik, pasti juga ujung-ujungnya diterima, maka dari itu saya selalu mengingatkan kalau ada

orang yang memberikan uang terus disuruh milih calon yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, jangan diterima karena itu sudah masuk dalam kecurangan politik. Kita sebagai masyarakat kalau mau ikut menghapus budaya itu ya harus tegas untuk menolak menerima". (Wawancara:Sabtu, 4 Mei 2019, 08.12 WIB).

Penuturan dari Dhiyan juga dibenarkan oleh Dhola, menurutnya *money politik* adalah bentuk kecurangan yang harus di hapuskan, karena itu sudah tidak sesuai dengan peraturan dalam pemilu.

"...awalnya berminat waktu ada yang ngasih uang, tapi ingat kata bapak jadi saya tolak. Menurut saya, politik uang harus dihilangkan soalnya itu bentuk kecurangan pada saat pemilu, padahal orang akan memilih juga berdasarkan sikapnya saat kampanye. Kalau sikapnya saja sudah buruk, nanti kalau jadi pemimpin pasti korupsi." (Wawancara:Sabtu, 4 Mei 2019, 10.13 WIB).

Politik uang yang sudah menjadi budaya dalam pemilu memang akan sangat susah untuk dihilangkan, karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa politik uang adalah sedekah dari para calon kepada masyarakat. Menurut Slamet, politik uang akan mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang karena pada saat mereka menjabat yang menjadi orientasinya adalah uang dan keuntungan pribadi, oleh karena itu politik uang tetaplah bentuk negative dari pemilu.

"...politik uang itu salah karena suatu bentuk kecurangan, jangan pernah menerima segala macam bentuk politik uang dari timses atau dari para calon. Kadang saya melihat, banyak sekali sosialisasi yang dilakukan oleh para calon yang berujung dengan politik uang, harusnya sosialisasi itu untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat dan untuk memberi pengetahuan terkait program kerja yang akan dilakukan, tapi ujung-ujungnya selalu member uang pada masyarakat yang datang. Di keluarga saya, dari dulu selalu menolak segala hal yang berhubungan dengan politik uang karena kami memiliki pandangan bahwa seorang pemimpin harus dipilih dari bibit, bebet dan bobotnya. Walaupun memang hampir tidak ada yang tidak terlibat dalam money politik, pasti ada satu orang yang memang sungguh ingin mengabdikan pada masyarakat. Kita sebagai warga negara hanya harus lebih selektif dalam memilih." (Wawancara: Minggu, 5 Mei 2019, 10.44 WIB).

Pandangan terkait *money politik* yang dianggap negatif oleh Slamet, juga mempengaruhi pola pikir dari Intan, baginya *money politik* adalah kecurangan yang harus diajuhi dan dihapuskan karena sudah melenceng dari implementasi pancasila.

"...*money politik* itu salah karena sudah tidak sesuai dengan asas-asas dalam pancasila, terutama dalam implementasi sila ke empat.

Untung di keluarga saya juga memiliki pandangan kalau *money politik* itu bentuk kecurangan para calon pemimpin jadi saya juga tidak terhasut, banyak lho temen-temen ku yang pada mau milih cuma karena nyari uang aja dan bukan karena kesadaran diri untuk memilih. (Wawancara:Minggu, 5 Mei 2019, 11.25 WIB).

Politik uang yang masih sering terjadi pada saat pemilihan, dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang pemenuhan hak dan kewajibannya agar sesuai dengan asas-asas dalam pemilu. Hal ini berakibat bahwa kegiatan politik uang dianggap sebagai budaya yang lumrah. Selain kasus politik uang yang kerap terjadi, pada saat pemilihan juga masih banyak pemilih pemula yang melakukan golput. Sehingga dalam hal ini orang tua berperan sebagai informan agar pemilih pemula tidak melakukan golput.

Golput merupakan suatu fenomena yang sering terjadi pada saat pemilu. Golput banyak dilakukan oleh masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih pemula, hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya kepada para elit politik dan juga kurangnya pemahaman mengenai hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Pendidikan politik sangat penting untuk diberikan, dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga karena memiliki pengaruh cukup besar untuk membentuk orientasi politik pemilih pemula.

Hal ini juga diungkapkan oleh Siti Fatimah, yang menyatakan bahwa perilaku golput memang tidak seharusnya dilakukan oleh pemilih pemula karena pemilih pemula dapat belajar politik juga melalui keikutsertaannya dalam pemilu,

"...golput ya tidak boleh dilakukan, karena anaku belajar politik dari salah satunya dengan penggunaan hak suara saat PEMILU. Walaupun begitu, saya ya tetap memberitahu anak saya kalau umur 17 tahun harus sudah memilih dan tidak boleh golput." (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, 11.42 WIB).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kholif, menurutnya golput yang sering dilakukan oleh teman sebaya atau seusiaanya dikarenakan kurangnya pemahaman terkait sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia.

"...kalau anak seumuran saya melakukan golput, biasanya karena belum tau kinerja orang-orang di pemerintahan seperti apa. Lalu, pandangan yang merujuk pada kenal atau tidaknya dengan para calon dan juga di umur saya belum terlalu ikut andil dalam dunia politik. Selain itu juga menurut pandangan saya, kebanyakan orang yang mencalonkan itu kebanyakan janji-janji saja

dan membuat bingung mau pilih yang mana”.(Wawancara: Sabtu 27 April 2019, 10.30 WIB).

Pandangan terkait golput juga berbeda dengan yang diungkapkan oleh Dhiyan, menurutnya golput juga terjadi karena kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap para calon elit politik, selain itu juga rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU maupun parpol yang mengakibatkan masyarakat khususnya pemilih pemula menjadi pasif dalam hal perpolitikan.

“...kalau menurut saya, golput terjadi karena kurangnya sosialisasi dan juga tidak adanya kepercayaan pada elit politik. Banyak pemilih pemula yang berpandangan hanya melihat dari sisi keuntungan saja, jadi mereka pasti berfikir walaupun menggunakan hak suara ataupun tidak pasti ya tidak akan ada kemajuan. Karena bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh kader atau para calon tidak pernah ada yang terfokus pada pemilih pemula, dan mereka cenderung melakukan sosialisasi politik secara isidental atau waktu mendekati pemilu. Karena sosialisasi atau pendidikan politik yang berhak memberikannya kepada para pemilih pemula ya parapol atau KPU itu sendiri. Maka dari itu, saya sebagai orang tua juga harus kasih pengertian ke anak tentang calon pemimpin yang sekiranya baik untuk masa depan negara”. (Wawancara: Sabtu, 4 Mei 2019, 10.45 WIB).

Berdasarkan pendapat Dhiyan, dapat disimpulkan bahwa golput yang terjadi bukan karena kesalahan pemilih pemula, namun juga menjadi kesalahan pihak parpol atau KPU yang kurang aktif dalam mensosialisasikan terkait pemilu dalam jangka waktu yang lama, hal ini juga yang mengharuskannya untuk memberi pengertian kepada anaknya agar tidak melakukan golput. Namun, dari wawancara dengan Dholo, golput yang dilakukan oleh pemilih pemula karena mereka masih bingung menentukan calon pilihannya walaupun sudah ada pamflet atau selebaran para calon di beberapa tempat.

“...saya kemarin milih karena sudah ada KTP sama dibilangin bapak kalau harus memilih waktu pemilu, saya gak mau golput juga karena sudah terdaftar di TPS. Kalau teman memang ada yang golput tapi tidak semua, mereka golput karena tidak tau mau milih siapa soalnya waktu kampanye gak ada pemberitahuan siapa yang harus dipilih, taunya dari gambar pamflet yang ditempel di jalan-jalan”.(Wawancara: Sabtu, 4 Mei 2019, 08.35 WIB).

Meskipun banyak pamflet atau selebaran yang berisi foto para calon politikus, tapi hal ini tidaklah cukup untuk mempengaruhi pola pikir para pemilih pemula untuk tidak melakukan golput. Disinilah peran keluarga terutama orang tua harus dapat membuat para pemilih pemula mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara di

usia yang dapat dikatakan cukup dewasa untuk mengerti tentang politik.

Informan selanjutnya adalah Sarni, menurutnya golput yang dilakukan oleh pemilih pemula karena belum memiliki tanda pengenal (KTP).

“golput yang dilakukan oleh kebanyakan anak remaja atau yang usia produktif karena rata-rata dari mereka tidak tau siapa yang akan mencalonkan diri di ranah pemerintahan. Walaupun tau ya hanya sekedar tau nama dan fotonya saja. Selain itu juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan para calon dalam berinteraksi dengan para pemilih pemula dan setiap keluarga juga tidak semuanya paham dengan politik, sebagai orang tua yang menjadi contoh untuk anak, jadi ya kalau untuk mengurangi angka golput hanya di beri pengertian saja kalau memang waktunya milih ya milih”. (Wawancara: Sabtu, 4 Mei 2019, 10.30 WIB).

Berdasarkan pendapat Sarni dapat disimpulkan bahwa setiap pemilihan selalu ada golput yang terjadi karena masih banyak para calon-calon yang bersikap acuh kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kurang peduli dengan kegiatan demokrasi di negara ini. Keluarga terutama orang tua merupakan figure yang menjadi contoh bagi anak, sehingga di dalam keluarga yang pasif atau bersikap acuh terhadap politik hal ini juga akan di contoh oleh anak tersebut. Bagi Iqbal, orang tua menjadi contoh yang patut ditiru walaupun dalam hal kecil sekalipun.

“...saya ikut orang tua saja kalau untuk urusan politik, karena saya tau bapak pasti akan memberi contoh baik untuk saya. Kemarin saya juga menjadi petugas KPPS menggantikan bapak, itu kan juga termasuk ikut berpartisipasi dalam politik. Dulu sering lihat bapak jadi anggota KPPS dan kadang jadi saksi, jadi saya tertarik untuk mencoba juga”. (Wawancara: Sabtu, 4 Mei 2019, 10.30 WIB)

Hasil wawancara dengan Sarni dan Iqbal menunjukkan bahwa keluarga memang memiliki peran dalam pendidikan politik, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Iqbal bahwa orang tua'nya mengajari Iqbal untuk ikut berpartisipasi dalam politik dengan menjadi petugas KPPS saat pemilu. Secara tidak langsung, orangtua memberikan pendidikan politik kepada anak melalui perilakunya.

Informan selanjutnya adalah Suhariawan, menurutnya golput adalah tindakan yang merugikan negara karena memiliki masyarakat yang pasif dalam berpolitik.

“...dari zaman reformasi, sudah banyak yang golput tapi sekarang lebih banyak. Golput sebenarnya merugikan negara, dari segi keuangan misal untuk mengeluarkan dana mencetak kertas pemilihan sudah pasti

menghabiskan banyak uang, tapi ternyata tidak semua ikut memilih. Mangkanya golput jangan dijadikan budaya, sebagai orang yang lebih tua harusnya kita memberi contoh yang baik untuk anak-anak muda.” (Wawancara : Minggu, 5 Mei 2019, 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dijelaskan bahwa golput yang sering dilakukan oleh pemilih pemula disebabkan dari kurangnya sosialisasi terkait politik yang diperoleh. Sehingga orang tua harus dapat berperan lebih aktif untuk memberikan pengetahuan politik secara umum.

Permasalahan terkait berita *hoax* yang sering beredar di media sosial juga menjadi salah satu pemicu tindakan golput dari pemilih pemula. Banyaknya berita-berita *hoax* yang saling menyudutkan satu pihak membuat masyarakat saling terprovokasi dan sering terjadi perselisihan. Tidak jarang banyak pertikaian yang terjadi karena perbedaan pandangan politik, sehingga menjadi saling bermusuhan dan saling mencela satu sama lain. Oleh karena itu, sangat perlu untuk menjaga keutuhan rasa persatuan dan kesatuan agar tidak mudah terpancing dengan berita atau info-info yang bertujuan untuk mengadu domba. Terkadang yang paling rawan untuk terpengaruh dengan berita-berita *hoax* adalah para remaja, karena mereka cenderung menelan berita secara mentah tanpa menyaring kebenaran dari berita atau info tersebut. Peran orang tua sangat berpengaruh, agar remaja dapat membedakan info yang memang benar atau hanya sekedar opini tanpa jelas sumbernya. Bagi Dhiyan, membedakan kebenaran informasi sangatlah mudah, karena berita atau info yang palsu terkadang berisi pembelaan pada salah satu pihak atau berisi hal yang negatif,

“...kalau berita *hoax* pasti isinya saling menjatuhkan orang lain dan berisi opini-opini yang menggiring publik kearah negatif, atau memuji-muji salah satu pihak. Sedangkan berita yang real pasti berisi informasi-informasi yang bermanfaat tapi tidak ada unsur menjatuhkan pihak-pihak tertentu atau bisa dikatakan netral. Jadi ya pasti anak ku udah mengerti karna kadang lihat debat di TV sama saya”. (Wawancara:Sabtu, 4 Mei 2019, 10.40 WIB).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Suhariawan dan Bagus yang juga mengatakan bahwa, “...berita *hoax* gampang kalau di identifikasi, bandingkan saja isi dari berita satu dengan berita lainnya dan lihat disitus remsi berita yang terpercaya. Biasanya aku lihat di situs kompas dan detik, itu sumbernya terpercaya dan kecil kemungkinannya kalau *hoax*.” (Wawancara:Minggu, 5 Mei 2019, 11.00 WIB).

Berdasarkan data di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa berita *hoax* dapat diidentifikasi dengan mudah walaupun hanya melalui judul saja. Pada zaman yang serba canggih, pemanfaatan media massa dan media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan, tidak terkecuali dalam memberikan pendidikan politik.

Beberapa keluarga, memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula secara tidak langsung dengan menggunakan media social dan massa. Hal ini dikarenakan, media memiliki informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pemanfaatan media adalah salah satu cara utama bagi orang tua untuk memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Pemanfaatan media sosial dan media massa merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi terkait politik yang sedang dibahas. Menurut Slamet, pemanfaatan media sosial sangat besar bagi pemberian pendidikan politik karena anak-anak pada saat ini sudah memiliki peralatan canggih seperti *smartphone* yang didalamnya terdapat konten-konten yang berisi informasi dan materi untuk belajar seperti *youtube* atau *google*.

“...saya suruh lihat *youtube*, karena di *youtube* banyak video simulasi sama penjelasan tentang politik yang lebih lengkap. Anak-anak usia Intan kadang jenuh kalau disuruh baca tulisan jadi ya opsi lainnya saya suruh lihat *youtube*, nanti kalau dia ada yang merasa tidak paham atau informasi yang disampaikan di *youtube* ada yang *hoax* baru tanya sama saya. Kenapa menggunakan *youtube* soalnya dia sudah ada HP canggih, dan lebih mudah banyak saja informasi yang bisa di *eksplora*. Selain itu juga saya kerjanya sampai sore jadi jarang ngobrol sama anak kecuali malam hari.” (Wawancara:Minggu, 5 Mei 2019, 10.25)

Intan juga mengungkapkan hal serupa, media sosial seperti *youtube* dan *facebook* atau *instagram* banyak berisi konten-konten terkait politik cukup banyak, tapi sisi negatifnya banyak berita *hoax* atau informasi yang kadang tidak masuk akal.

“...di media sosial banyak, jadi gak perlu repot kalau mau belajar politik. saat pemilu juga sama ayah disuruh lihat *youtube* untuk cari perbandingan dan biodata lengkap orang yang mau tak pilih.” (Wawancara: Minggu, 5 Mei 2019, 10.25 WIB).

Dari hasil wawancara kepada informan, memang penggunaan media sosial lebih mudah untuk mencari materi dan juga biodata seseorang. Selain itu dengan media sosial kita juga bisa lebih tau terkait kinerja serta jejak digital dan reputasi selama bekerja di pemerintahan. Selain Slamet yang menggunakan media sosial untuk memberikan pendidikan politik, hal serupa juga dilakukan oleh Suhariawan, menurutnya media sosial adalah media utama yang sangat membantu kaum milenial untuk mencari informasi,

“jaman sekarang banyak pakai medsos ya anak-anak muda, jadi enak kalau tak suruh nyari informasi tentang calon 01 sama 02 sekalian tak ajak diskusi nanti enaknya mau pilih siapa. Penggunaannya ya cuma untuk itu saja.” (Wawancara:Minggu, 5 Mei 2019, 10.45 WIB).

Berbeda dengan penuturan Bagus, dia lebih sering melihat *instagram* untuk mencari informasi tentang berita-berita politik yang sedang ngetrend atau ramai di bahas,

“*instagram* lebih *up to date*, karena disitu banyak forum berita-berita yang sedang membahas tentang isu-isu politik. Biasanya pakai youtube tapi jarang karena lebih aktif memakai *instagram*.” (Wawancara: Sabtu, 4 Mei 2019, 09.30 WIB).

Hasil wawancara dengan empat informan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memang yang paling cocok untuk belajar politik karena terdapat materi dan juga mencakup banyak berita tentang isu-isu politik yang sedang terjadi. Selain pemanfaatan media sosial dan media massa, orang tua juga memanfaatkan kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh beberapa parpol. Sosialisasi politik sering digunakan oleh orang tua sebagai media penyampaian materi atau pesan dari wakil rakyat maupun calon yang akan mengikuti pemilihan. Sosialisasi politik banyak diikuti oleh beberapa orang tua karena dianggap sebagai wadah untuk memperoleh materi terkait politik, dan penjelasan fungsi serta program kerja pemerintah dalam mengelola kebijakan publik atau sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Sosialisasi politik masuk ke dalam pendidikan politik, karena di dalam sosialisasi banyak membahas materi terkait politik. Seperti yang disampaikan oleh Siti, bahwa dirinya sering mengikuti dan mengajak anaknya untuk hadir sebagai peserta atau konstituen dalam sosialisasi politik yang diadakan oleh pemerintah.

“...saya sering ikut sosialisasi politik tapi tidak di desa Ngares, saya ikut di desa Sumberdadi dan Ngantru. Di desa Ngares pernah sekali ada sosialisasi politik dari partai PDI, saya juga ikut tapi setelah itu tidak ada lagi. Yang dibahas dalam sosialisasi terkait visi misi calon-calon saat mereka nanti jadi dan disuruh mendukung/mencoblos mereka. Yang jadi narasumber di desa Ngares hanya ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi waktu di desa Sumberdadi saya ajak anak saya soalnya untuk semua umur dan biar anak saya juga dapat pencerahan dari para caleg tentang pentingnya memilih.” (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, 08.30 WIB).

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Siti, dapat dilihat bahwa sosialisasi politik yang ada diadakan oleh parpol kepada konstituen dijadikan sebagai batu loncatan untuk menarik simpati masyarakat, selain itu dari pernyataan Kholif, mengatakan bahwa dalam sosialisasi politik yang diikuti memang membahas tentang politik dan fungsi serta tugas DPRD.

“...ikut sama emak, dijelaskan fungsi dan tugas DPRD sama dikasih tau produk-produk yang dihasilkan saat menjabat jadi anggota legislatif. Kalau lainnya ya diskusi tentang visi misi sama

program kerjanya.” (Wawancara: Sabtu, 27 April 2019, 08.30 WIB).

Selain pendapat yang diungkapkan oleh Kholif, menurut Dhiyan di daerah tempat tinggalnya jarang sekali ada sosialisasi politik, walaupun ada hanya sebatas pengenalan calon dan visi misi saat menjabat. Tetapi, dirinya tetap mengikuti sosialisasi yang diadakan karena ingin mengenalkan kepada anaknya bahwa salah satu tugas calon-calon legislative adalah memberikan pendidikan politik lewat sosialisasi yang diadakan.

“...kebiasaan kalau setiap ada pilihan pasti ikut jadi peserta sosialisasi, selain tau visi misi dan program kerjanya juga saya gunakan untuk mengajak anak saya untuk ikut sosialisasi agar dia bisa tau secara langsung bahwa calon-calon yang menurutnya bisa dijadikan panutan siapa saja. Di sosialisai politik biasanya banyak calon yang terlihat memang ingin mengabdikan dengan sungguh atau hanya jadi batu loncatan saja pasti sudah bisa dibedakan.” (Wawancara: Sabtu, 4 Mei 2019, 10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik penting untuk dilakukan sebagai salah satu bentuk pendidikan politik karena pemilih pemula dapat ikut secara langsung proses kampanye yang dilakukan oleh para calon.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran keluarga di dalam proses pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih pemula. Rumusan masalah akan dianalisis menggunakan teori Belajar Sosial oleh Albert Bandura. Teori tersebut akan menjelaskan proses pendidikan politik yang dilakukan oleh keluarga yang terdapat dalam empat tahapan yaitu tahap perhatian, penyimpanan dalam ingatan, reproduksi dan tahap motivasi. Pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan oleh beberapa agen sosialisasi politik secara sadar dan bertujuan untuk menanamkan serta meningkatkan pemahaman warga negara terkait hak, kewajiban, dan tanggungjawab agar setiap orang memiliki kesadaran berpolitik. Proses dalam memberikan pendidikan politik tidak terbatas hanya pada usia-usia tertentu, tetapi dapat diberikan kepada orang dewasa atau remaja. Dalam penelitian ini, pendidikan politik diberikan kepada remaja atau anak usia 17 tahun yang akan menggunakan hak suaranya untuk pertama kali.

Pemberian pendidikan politik bagi pemilih pemula dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan juga sekolah. Pada dasarnya pemilih pemula mendapatkan pendidikan politik pertama kali dari keluarga, karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk belajar. Pada penelitian ini terdapat 7 informan utama dan 7 informan

sekunder, yang disesuaikan dengan kriteria informan yang sudah ditentukan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung.

Keluarga termasuk agen sosialisasi politik yang memiliki fungsi salah satunya untuk memberikan pendidikan politik bagi anak-anaknya. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, menyatakan bahwa terdapat beberapa proses dari keluarga dalam memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik yang secara sadar diberikan oleh orang tua kepada pemilih pemula, dimulai sejak anak berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Proses pengenalan politik, dilakukan oleh orangtua kepada pemilih pemula pada saat adanya pemilihan umum, hal ini dilakukan agar pemilih pemula dapat memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Citra politik bagi sebagian masyarakat masih dianggap buruk, sehingga banyak pemilih pemula yang berasumsi bahwa politik selalu memiliki unsure negative. Pandangan yang seperti ini, mengakibatkan banyaknya pemilih pemula yang golput. Apabila orang tua memiliki pola pikir yang berbeda, maka sangat memungkinkan bagi pemilih pemula untuk tidak selalu melihat politik dalam hal negative. Pendidikan politik dianggap wajib oleh orang tua untuk diberikan kepada pemilih pemula, sebagai bentuk tanggungjawab orang tua dalam menumbuhkan kesadaran berpolitik anak. Bagi orang tua, pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih pemula hanya sebatas pengertian umum atau garis besarnya, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan yang memadai dari orang tua terkait politik.

Pendidikan politik didalamnya terdapat penguatan yang dilakukan oleh orang tua. Penguatan yang dilakukan selama proses pemberian pendidikan politik, adalah pada saat berdiskusi ataupun saat pemilih pemula bertanya mengenai isu-isu politik yang sering terjadi. Isu-isu politik yang kerap terjadi, salah satunya adalah aksi demo. Selain itu juga pada saat bertanya tentang calon-calon dalam pemilu, yang berkaitan dengan latarbelakang kehidupannya. Dari bentuk pertanyaan ini, orang tua dapat memberikan umpan balik kepada pemilih pemula dengan penjelasan tentang fungsi, serta aturan dalam berpolitik. Pada kegiatan kampanye misalkan, sering terjadi penyebaran hoax atau berita palsu, untuk meminimalisir pengaruh negative dari berita hoax tersebut, orang tua memberikan penjelasan agar pemilih pemula tidak terprovokasi dengan isi dari berita tersebut.

Meskipun orang tua memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam proses pendidikan politik, tetapi pemilih pemula akan dapat belajar berpolitik dengan baik melalui kegiatan di masyarakat, sebagai bentuk dukungan dalam menumbuhkan kesadaran politik.

Kegiatan yang dilakukan salah satunya dengan menjadi anggota KPPS dalam pemilu, dan ikut aktif dalam karangtaruna di lingkungan, maupun organisasi di sekolah. Permasalahan lainnya adalah *money politik* yang selalu terjadi pada saat pemilu. Sebagai masyarakat yang menganut asas pemilu luber jurdil, haruslah memiliki kesadaran bahwa *money politik* merupakan bentuk kecurangan yang tidak seharusnya di budayakan.

Bentuk kecurangan seperti *money politik* sering terjadi dalam kegiatan kampanye. Kampanye yang seharusnya dijadikan sebagai kegiatan yang positif, tetapi pada kenyataannya digunakan sebagai budaya *money politik*. Tidak adanya sosialisasi politik yang dilakukan oleh parpol atau KPU, juga merupakan salah satu penyebab adanya golput dari pemilih pemula. Hal ini dikarenakan, banyak dari pemilih pemula yang tidak mengenal calonnya atau tidak paham dengan visi misinya. Golput juga didasari dari sikap pemilih pemula yang kurang mempercayai para calon legislative, hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus korupsi dan hasil kinerjanya yang tidak sesuai dengan visi misi saat kampanye.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendidikan politik yang diberikan orang tua kepada pemilih pemula, maka dapat dikaitkan dengan teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar sosial dari Bandura mendefinisikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. Pembelajaran terjadi dalam keterkaitan antara tiga pihak yaitu lingkungan, perilaku dan factor-faktor pribadi. Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas hal ini telah sesuai dengan model yang peneliti gunakan. Penelitian ini mencoba mengaitkan informasi maupun data-data dengan teori Belajar Sosial Bandura terkait pendidikan politik yang diberikan keluarga kepada pemilih pemula.

Teori ini akan menjelaskan proses belajar sosial melalui empat tahapan yaitu perhatian, penyimpanan dalam ingatan, reproduksi, dan motivasi, sebagai berikut:

Pertama, tahap perhatian. Pada tahap ini orang tua memberikan pengetahuan tentang politik melalui media sosial atau media massa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula lebih banyak menggunakan media sosial untuk memperoleh berbagai informasi. Oleh karena itu, orang tua menggunakan media sosial sebagai wadah agar anak belajar memahami politik melalui informasi yang ada di internet.

Kedua, proses pemberian pendidikan politik melalui contoh sikap demokratis. Salah satu dari contoh ini adalah dengan menolak adanya politik uang dan tidak melakukan golput. Proses ini masuk kedalam tahap penyimpanan dalam ingatan, dimana segala bentuk contoh perbuatan atau perilaku harus dilakukan secara jelas. Pendidikan politik yang diberikan secara nyata

akan lebih mudah untuk ditiru oleh anak karena orang tua dijadikan sebagai figure. Dari hasil penelitian juga didapatkan beberapa pernyataan bahwa politik uang masih sering terjadi, sehingga masih banyak pemilih pemula yang ikut menerima secara wajar kegiatan tersebut. Sehingga orang tua harus dapat menjadi contoh positif bagi pemilih pemula, untuk tidak ikut kedalam kegiatan politik uang. Selain money politik juga masih banyak perilaku golput yang dilakukan oleh masyarakat.

Golput menjadi fenomena yang masih sering terjadi dalam pemilu. Namun, dari hasil penelitian didapatkan beberapa pernyataan bahwa golput terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik rendah sehingga memunculkan asumsi bahwa politik tidak begitu penting untuk sebagian orang. Salah satu cara mengantisipasi agar pemilih pemula tidak golput adalah dengan memberikan pemahaman dan contoh positif dari keluarga.

Ketiga, tahap reproduksi. pada tahapan ini, proses pendidikan politik dilakukan dengan cara berdiskusi. Pada saat berdiskusi, orang tua dan pemilih pemula akan saling memberikan feedback. Sehingga pada tahapan ini, orang tua dapat memberi penguatan kepada pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Dari hasil penelitian, terdapat beberapa pernyataan bahwa diskusi yang dilakukan dengan pemilih pemula adalah membahas tentang evaluasi kerja para calon legislative, membahas tentang isu-isu politik yang berkaitan dengan agama dan kegiatan demo yang terjadi pada saat pemilu. Hal ini bertujuan agar pemilih pemula tidak terprovokasi dengan hal-hal negative pada saat pemilu. Sosialisasi politik juga termasuk dalam kegiatan pendidikan politik, dari pernyataan Ibu Siti bahwa dia selalu mengikuti kegiatan sosialisasi politik yang ada di beberapa tempat, tujuannya adalah agar pemilih pemula dapat belajar secara langsung dengan para calon anggota legislative.

Keempat, tahap motivasi. Pada tahap ini orang tua memberikan dukungan dan pengawasan kepada pemilih pemula dalam kegiatan berpolitik di dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya dengan ikut aktif dalam kegiatan pemilu atau berorganisasi. Dari hasil penelitian, didapatkan pernyataan bahwa orang tua, memberikan pendidikan politik melalui kegiatan organisasi disekolah dan mengikut sertakan pemilih pemula sebagai saksi dalam perhitungan suara ataupun anggota KPPS. Dari kegiatan tersebut, pemilih pemula akan lebih paham tentang fungsi masyarakat untuk dapat aktif dalam hal berpolitik.

Proses-proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar apabila orang tua dan anak saling memiliki *feedback*. Oleh karena itu di dalam memberikan pendidikan, tidak dapat dilakukan secara instan dan harus dilakukan secara bertahap agar dapat tercapai tujuan yang

diinginkan. Melalui peran orang tua sebagai pendidik dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran berpolitik dari pemilih pemula. Sehingga dapat mengurangi tingkat golput yang dilakukan oleh pemilih pemula.

PENUTUP

Simpulan

Proses dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula adalah dengan melakukan diskusi, ikut dalam sosialisasi politik, memberikan dukungan serta motivasi dalam mengikuti kegiatan politik, memanfaatkan media sosial ataupun media massa, serta memberikan contoh-contoh sikap demokratis.

Orang tua memiliki peran utama dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula melalui tahapan pengenalan, penguatan serta pengawasan. Pengenalan merupakan tahapan dimana orang tua mulai memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, sedangkan pada tahap penguatan orang tua memberikan contoh serta berperan sebagai informan dalam memberikan pendidikan politik. Pada tahap pengawasan, orang tua memberikan motivasi dan dukungan agar pemilih pemula dapat aktif pada kegiatan politik di lingkungannya.

Saran

Orang tua seharusnya lebih memiliki inisiatif dalam mengenalkan pendidikan politik kepada pemilih pemula sejak dini dan dilakukan secara terus menerus, tidak hanya saat pemilu saja sehingga akan menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran politik dari pemilih pemula. Hal ini dikarenakan pendidikan politik dapat berjalan dengan baik jika dilaksanakan secara berkala dan terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1990. Budaya Politik : Tingkah laku politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: BumiAksara
- Affandi, Idrus. 1996. Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik. Disertasi Pascasarjana IKIP Bandung, Tidak diterbitkan.
- Budiarjo Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ginting Firman, 2013. Peran Pendidik sebagai Role Model dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik. ISBN : 978-602-361-045-7
- Kartini, Kartono. 2009: Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung: CV. Mandar Maju

M M Kartikasari, I M Suwanda, A S Adi, 2017. Political View of Youth voters in Surabaya. *Journal of Physics: Conf. Series* 953

Natalia Angga, 2015. Peran Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia. *Jurnal Tapis : Vol. 11 No. 1*

Sugiyono, 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung

www.pressreader.pemilihpemula.com (diakses pada 14 Februari 2019)

<http://nasional.kompas.jumlahpemilih.com> (diakses pada 24 Januari 2019)

www.KBBOnline.com (diakses pada 14 Januari 2019)

www.merdekapendidikanpolitik.com (diakses pada 22 Februari 2019)

